



LEMBARAN KALURAHAN PONJONG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 04

TAHUN : 2024

PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR ..4.. TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Ponjong tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ponjong Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2022 nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2025 nomor 5);

21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Ponjong tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2024 nomor 6;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONJONG

Dan

LURAH PONJONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp. 3.157.872.500,00 | |
| 2. Belanja Kalurahan | : Rp. <u>3.207.871.194,00</u> | - |
| Surplus/Defisit | (Rp. 49.998.694,00) | |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 49.998.694,00 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. <u>0,00</u> | - |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp. 49.998.694,00 | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong.

Ditetapkan di Ponjong
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH PONJONG

Ttd

ARIF AL FAUZI

Diundangkan di Ponjong
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK PONJONG

ttd

WAKHID ARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PONJONG TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.323.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.006.549.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.157.872.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	815.114.540,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.626.623.654,00	
5.3.	Belanja Modal	716.533.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.207.871.194,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.998.694,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.998.694,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.998.694,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.998.694,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ponjong, 31 Desember 2024
LURAH PONJONG

Ttd

ARIF AL FAUZI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.323.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.006.549.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.157.872.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.333.754.394,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	950.647.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	654.263.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	654.263.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.698.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.698.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.574.020,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.574.020,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.120.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.493.840,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.493.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	111.646.924,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	800.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.086.924,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.086.924,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	98.410.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	94.530.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	550.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.263.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.790.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.295.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.295.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.388.000,00	PBH, PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.388.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.175.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	8.615.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.000,00	
1.3.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	139.757.070,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.860.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	17.545.000,00	DDS, PAD, PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.545.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.415.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.415.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.560.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.405.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.855.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	1.550.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.080.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.983.829,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.983.829,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.060.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.010.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.550.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.633.241,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.241,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	85.440.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	75.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	
1.5.03	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.440.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.031.331.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.450.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.950.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.549.250,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.080.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.461.750,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.461.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.887.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.887.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.645.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.580.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	59.395.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.395.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	572.490.050,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	145.507.050,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.427.050,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	143.080.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	330.050.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	327.990.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	96.933.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	95.583.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	305.250.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	263.875.000,00	PBH, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.875.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	41.375.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.375.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.562.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.562.500,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.562.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	23.030.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	23.030.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.030.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>169.270.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	57.760.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.450.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.405.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.905.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.000.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.920.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.925.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.925.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	31.955.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.955.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	12.040.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.670.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.605.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.605.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.080.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.185.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.920.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.055.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.390.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.715.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.715.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.735.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.390.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.985.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.650.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>623.915.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	601.640.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	500.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	101.640.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.640.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.015.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.700.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.315.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.315.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.110.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.550.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.560.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.250.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.250.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>49.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.207.871.194,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.998.694,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.998.694,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	49.998.694,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ponjong, 31 Desember 2024

LURAH PONJONG

Ttd

ARIF AL FAUZI